**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap pembangunan selalu di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM),

dimana manusia diposisikan sebagai sasaran pembangunan dan sebagai pelaksana

dari pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia merupakan faktor yang berperan amat penting, karena tanpa adanya sumber daya manusia, pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Putra (2012) menjelaskan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang mendapat perhatian dalam melaksanakan pembangunan. Asumsinya, dengan pendidikan Sumber Daya Manusia yang tercipta adalah Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkualitas. Selain itu, pendidikan bukan hanya sebagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga merupakan kebutuhan manusia dalam hal pembentukan manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang nantinya mendukung kebutuhan pengakuan orang lain terhadap dirinya. Menurut pendapat Abraham Maslow (Corey, 2005) tentang skala kebutuhan manusia bersifat hirarkis mulai dari yang paling mendasar yaitu *basic physical need* sampai dengan *self actualization and fulfillment*.

Depdiknas (2003) menyatakan secara umum dalam memasuki abad ke XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten agar mampu bersaing dengan pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional (sisdiknas), sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Suyanto & Hisyam (2000: 8) bahwa pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis

GBHN 1993 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Kartasasmita (2001 : 293) menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui empat jalur kebijaksanaan yaitu : (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya, (2) Peningkatan kualitas sumber daya yang produktif dan upaya penyebarannya, (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek, serta (4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Sehubungan dengan hal  ini  Coombs  (1973: 87) membedakan  pengertian  ketiga  jenis  pendidikan  itu  sebagai berikut:

Pendidikan  formal  adalah  kegiatan  yang  sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari  sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan  latihan professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari   pengalaman hidup  sehari-hari,  pengaruh  lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh  kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan teroganisasi dan sistematis, di luar system persekolahan yang, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mancapai tujuan belajarnya.

Ketiga    pengertian    di    atas    dapat    digunakan    untuk    membedakan    program pendidikan  yang termasuk   ke dalam   setiap   jalur pendidikan   tersebut.  Sebagai   bahan untuk menganalisis berbagai program pendidikan maka ketiga batasan pendidikan di atas perlu diperjelas lagi dengan kriteria yang  dapat membedakan antara pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal dengan pendidikan  yang program-programnya bersifat informal dan formal. Perbedaan antara pendidikan yang  program-programnya bersifat nonformal dan informal dapat dikemukakan sebagai berikut. Pendidikan  yang rogram-programnya bersifat nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan  di  lingkungan  masyarakat  dan  lembaga-lembaga,  untuk  melayani kebutuhan  belajar  khusus  para  peserta  didik.  Sedangkan  pendidikan  yang  program- programnya    bersifat  informal tidak diarahkan untuk melayani kebutuhan belajar yang terorganisasi.    Kegiatan    pendidikan    ini    lebih    umum,    berjalan    dengan    sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga,  serta  melalui media massa, tempat bermain, dan lain sebagainya.

Jalur pendidikan nonformal merupakan kegiatan pendididikan diluar sistem persekolahan yang sistematis dan terorganisasi. Dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pramono (2003: 4) menyatakan “program layanan pendidikan bagi masyarakat pada jalur non pendidikan formal hendaknya menekankan pada pendekatan pelayanan secara holistik dan terintegrasi”. Holistik dalam arti semua aspek yang mempengaruhi perkembangan warga belajar, seperti gizi, kesehatan, psiko-sosial, dan rangsangan intelektual diperhatikan secara simultan. Selain itu layanan pendidikan juga sedapat mungkin bisa menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, melalui beragai program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan disesuaikan dengan status sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya Hanafi (2002) menjelaskan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu bagi warga belajar. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diberikan kepada warga belajar diberikan dalam waktu yang singkat tanpa harus berjenjang atau bersinambungan.

Proses pembelajaran pada saat ini menuntut satu strategi yang berbeda dengan masa lalu. Dengan perkembangan global yang terjadi proses pembelajaran bukan hanya dalam bentuk pemrosesan informasi, akan tetapi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia kreatif yang adatif terhadap tuntutan yang berkembang. Upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas telah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama. Sejalan dengan peran strategis pendidikan tersebut, dewasa ini animo masyarakat terhadap pendidikan mengalami peningkatan, paling tidak ditandai dengan adanya kecenderungan persamaan persepsi masyarakat dalam menempatkan pendidikan sebagai sebuah ”investasi” dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

Pendidikan sebagai proses sosial merupakan langkah memfasilitasi potensi untuk mencapai perkembangan diri secara maksimal, proses pewarisan nilai budaya dan perwujudan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan dalam proses pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan, keterampilan, sikap mental, daya saing, dan peran aktif masyarakat dalam tatanan kehidupan modern (era globalisasi). Keluaran pendidikan harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai jenjang dan basis keahlian atau keterampilannya. Oleh sebab itu, Rosyada (2004: 9) menyatakan bahwa:

reformasi pendidikan di Indonesia merupakan keharusan, dengan perbaikan menyeluruh dalam semua aspeknya, agar dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar tenaga kerja, dalam level dan jenis apapun profesinya.

Terkait permasalahan di atas, pemerintah telah menempuh langkah-langkah pembaharuan di dalam pendidikan, baik dalam hal jenis, satuan, maupun penyediaan anggaran, sehingga dapat diharapkan terciptanya keluaran yang optimal. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional itu saat ini diarahkan untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Depdiknas (2009) menyatakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema/pilar, yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik .

Pemerataan dan Perluasan Akses di bidang pendidikan nonformal, dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup, untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional.

Data BPS bulan Februari 2014 ([www.BadanPusatStatistik.com](http://www.BadanPusatStatistik.com). Diakses pada Tanggal 18 Juli 2014) melansir data mengenai kondisi tenaga kerja di Indonesia. Angkatan kerja Indonesia per Februari 2014 mencapai 125,32 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan angkatan kerja Februari 2013 yang hanya 123,64 juta orang. Sebanyak 118,17 orang bekerja dan sisanya 7,15 juta orang menganggur. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, diantaranya: Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara *supply* and *demand*). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (*mismatch*), Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (*unskilled labour*), dan Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Dari keempat faktor tersebut, faktor pertama, kedua dan ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan pengangguran di Indonesia. Dari gambaran tersebut di atas maka perlu dikembangkan program-program kursus dan pelatihan dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran. Menyikapi kondisi tersebut, maka diperlukan kebijakan yang strategis dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

Ditengah era globalisasi seperti sekarang ini, lembaga pendidikan seperti lembaga kursus olah vocal rasanya sudah wajib menjadi suplemen pembelajaran remaja. Banyak orang tua yang rela membayarkan uangnya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah karena olah vokal merupakan salah satu item keterampilan yang setidaknya dimiliki oleh setiap orang. Bakat dan minat dalam seni suara yang dimiliki oleh remaja butuh penyaluran agar keterampilan yang dimiliki tidak sia-sia.agar anaknya dapat mengolah vokalnya dengan baik. Hanya untuk sekedar meningkatkan nilai pelajaran seni di sekolah atau bahkan mimpi agar anak dapat berprestasi di dalam dunia tarik suara saat ini sudah bukan menjadi suatu hal yang luar biasa lagi. Maka dari itu, banyak pembisnis yang mulai mendirikan lembaga kursus dan berlomba-lomba membuat lembaganya menjadi lembaga kursus paling handal. Karena faktanya, pelajaran seni berupa seni suara di sekolah tidak sepenuhnya dapat membantu anak mengetahui vokal yang seharusnya menjadi ciri khas ataupun bakat vokal yang dimilikinya.

Namun tidak semua pengelolaan dan pembelajaran di lembaga kursus olah vokal saat ini sudah sepenuhnya efektif dalam hal pengelolaan dan pembelajaran untuk peserta didik. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di bidang pendidikan nonformal dalam memberikan pengarahan kepada penyelenggara lembaga agar para orang tua tidak sia-sia membayarkan uangnya untuk memperoleh pendidikan vokal di lembaga kursus yang nantinya akan membantu anak dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraannya dimasa depan nanti.

Untuk menilai efektifitas penyelenggaraan kursus olah vokal, maka peneliti menggunakan model evaluasi CIPP. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Shuffelbeam (1967). Model evaluasi CIPP ini merupakan salah satu dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Selain itu, model CIPP juga memiliki keuanggulan lain yaitu sistematis untuk menilai rancangan,implementasi dan efektifitas suatu program. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model CIPP dalam menilai efektifitas penyelenggaraan kursus olah vokal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis mengambil lokasi di Lembaga Kursus Olah Vokal SKB Ujung Pandang. Penulis mengadakan penelitian dari sudut efektivitas penyelenggaraan. Alasannya adalah analisa efektivitas penyelenggaraan pendidikan olah vokal dalam meningkatkan pendidikan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteran sosial dan pelayanan umum diperlukan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, penerapan tata kerja, serta manajemen yang merupakan bagian dari Pendidikan Non Formal.

Selama ini belum pernah dilakukan kriteria penyelenggaraan kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar. Dengan adanya kriteria CIPP, diharapkan dapat diketahui penyelenggaraan kursus olah vokal. Umar (2010) menjelaskan dari segi *context* meliputi karakteristik warga belajar, kurikulum, tenaga pelaksana dan sarana dan prasarana. Dari segi *input*, hal yang perlu dievaluasi meliputi kemampuan sistem yang digunakan dalam program, strategi untuk mencapai tujuan dan rancangan strategi yang dipilih. Dari segi *process* yaitu hubungan antara warga belajar dengan instruktur, media komunikasi, logistik, jadwal kegiatan, sumber daya dan potensi penyebab kegagalan program. Dan yang terakhir yaitu ditinjau dari segi *product* yang meliputi pencapaiaan program selama pelaksanaan dan akhir program.

Pelaksanaan suatu lembaga pendidikan, terutama pendidikan masyarakat menjadi tanggungjawab bukan hanya dari pengelola lembaga, melainkan juga dari masyarakat lingkungan sekitar. Namun, tidak semua lembaga pendidikan mampu memberikan hasil yang maksimal apabila tidak disertai dukungan dari seluruh elemen, seperti yang diinginkan. Hal ini bisa terjadi akibat kurang memadainya tenaga kerja serta fasilitas yang ada begitu pula dengan kondisi pengelolaan Kursus Olah Vokal UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar saat ini.

Beranjak dari pemikiran tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan sejauh mana hasil pelaksanaankursus olah vokal dapat memberi pengaruh positif dan dapat meningkatkan kemampuan olah vokal setelah mengikuti kegiatan di Kursus Olah Vokal UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk itu perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul “Hasil Pelaksanaan Lembaga Kursus Olah vokal Di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar”.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penelitian ini memiliki fokus masalah sebagai berikut:

* 1. Kriteria *Context*
     1. Bagaimanakah karakteristik warga belajar kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
     2. Bagaimanakah kurikulum yang digunakan pada kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
     3. Bagaimanakah tenaga pengajar kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
  2. Kriteria *Input*
     1. Bagaimana kemampuan sistem yang digunakan dalam program kursus olah vokal di SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
     2. Bagaiamana strategi untuk mencapai tujuan kursus olah vokal di SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
  3. Kriteria *Process*
     1. Bagaimana hubungan antara warga belajar dengan instruktur dalam kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
     2. Bagaimana media pengajaran dalam kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
  4. Kriteria *Product*
     1. Bagaimana pencapaian hasil warga belajar pada pelaksanaan kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?
     2. Bagaimana pencapaian hasil belajar warga belajar pada akhir program pada kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

* 1. Kriteria *Context*
     1. Untuk mengetahui karakteristik warga belajar kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     2. Untuk mengetahui kurikulum yang digunakan pada kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     3. Untuk mengetahui tenaga pengajar kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
  2. Kriteria *Input*
     1. Untuk mengetahui kemampuan sistem yang digunakan dalam program kursus olah vokal di SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     2. Untuk mengetahui strategi untuk mencapai tujuan kursus olah vokal di SKB Ujung Pandang Kota Makassar
  3. Kriteria *Process*
     1. Untuk mengetahui hubungan antara warga belajar dengan instruktur dalam kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     2. Untuk mengetahui media pengajaran dalam kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     3. Untuk mengetahui jadwal kegiatan dalam kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
  4. Kriteria *Product*
     1. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar warga belajar selama pelaksanaan pada kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar
     2. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar warga belajar pada akhir program pada kursus olah vokal di UPTD SKB Ujung Pandang Kota Makassar

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber pengetahuan yang berarti bagi dunia akademis, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan telaah kajian mengenai efektifitas pengelolaan dan pembelajaran Kursus Olah Vokal saat ini.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Warga Belajar/Peserta Didik

Memberikan kontribusi dan masukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan kursus demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas

b. Bagi penulis

Bagi penulis, melakukan penelitian dan membuat tulisan itu sangat berguna untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan dengan cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Serta dapat melatih kemampuan penulis, baik dalam konteks menuangkan hasil pikiran dalam bentuk tulisan, maupun sebagai bahan penulis untuk menjadi tutor.